BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pengendalian internal harus cukup fleksibel untuk memenuhi struktur spesifik kantor notaris. Kekhasan kantor notaris berasal dari fakta bahwa kantor notaris merupakan bisnis yang menawarkan jasa kepada masyarakat mengenai keberadaan alat bukti dalam hal perikatan dan perjanjian lainnya antara subjek hukum; selain itu, notaris bertanggung jawab untuk membuat data otentik berdasarkan hukum, dan beberapa juga berfungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah, yang bertugas membuat akta otentik yang berkaitan dengan tindakan hukum di bidang pertanahan. Akibatnya, notaris merupakan perusahaan yang menyediakan jasa yang sulit untuk bersaing karena keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat menurut A Zaidan (2019). Oleh karena itu, pengendalian internal harus cukup fleksibel untuk beradaptasi.

Sebuah organisasi memiliki pengendalian internal yang berfungsi sebagai pengawasan dan manajemen dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan. Selain itu, karena perusahaan akan mencapai tujuan yang diinginkan - seperti membangun lingkungan pengendalian yang baik - dengan bantuan sistem pengendalian internal, pengawasan dalam organisasi juga digunakan untuk mencegah kecurangan, pencurian transaksi, dan pelanggaran lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, organisasi akan dapat terus beroperasi dan melaksanakan semua tugasnya secara efektif dan efisien, memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif dapat terpenuhi secara teratur (Florencia, 2020). Untuk mencapai struktur perusahaan yang diinginkan, manajemen perusahaan harus membuat struktur organisasi yang sesuai. Sistem pengendalian internal yang solid, menurut Mulyadi (2017), mengamanatkan agar semua pengeluaran kas dibayar dengan cek. Namun, beberapa pengeluaran kas terlalu kecil untuk dibayar dengan cek, dalam hal ini dibayar dengan menggunakan sistem imprest dan dana kas kecil.

Menurut Wahyu (2020). Uang sebesar Rp. 8.965.357.790 digelapkan oleh kepala bagian keuangan sebuah perusahaan tekstil di Sleman. "Tersangka menggelapkan uang

perusahaan sebanyak Rp. 8.965.357.790. Modusnya adalah menggelapkan sebagian uang hasil pencairan cek milik perusahaan." Menurut laporan tersebut, tersangka melakukan aksinya antara tahun 2018 dan 2019. Baru setelah perusahaan melakukan audit pada bulan Februari 2020, tindakan tersebut terungkap.

Jika dilihat dari sisi tersangka menggelapkan uang kas perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi antara cek yang diuangkan dengan yang telah disetorkan kembali ke rekening perusahaan. Hal ini merupakan salah satu aspek pengendalian internal atas kas perusahaan yang lemah yang terbukti pada saat tersangka melakukan penggelapan uang. Hal ini dikarenakan tidak adanya audit kas yang rutin dilakukan oleh perusahaan.

Pengendalian merupakan alat yang dapat membantu pimpinan dalam menjalankan tanggung jawabnya, demikian pernyataan Paul & Marshall (2016). Jika bisnis menetapkan sistem yang baik, efektif, dan efisien untuk mendukung operasional dan pengawasan, maka kegiatan bisnis akan diselesaikan dengan cepat dan rapi (Marshall B Romney, 2014).

Dalam upaya memperbaiki, mengarahkan, mengendalian serta mengawasi berbagai kegiatan agar tujuan perusaaan dapat tercapai maka penggunaaan seluruh sumber daya perusahaan harus dilakukan hal ini yang disebut sebagai pengendalian internal. Menurut Maharani (2020), sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen bisnis yang baik memiliki keterkaitan yang erat. Tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai jika didukung oleh pengendalian internal yang kuat, karena ini merupakan salah satu instrumen perusahaan untuk melakukannya.

Menurut Mulyadi (2017), pengendalian internal adalah koordinasi struktur organisasi, prosedur, dan ukuran-ukuran yang digunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keandalan dan ketelitian informasi akuntansi, mendorong efisiensi, dan menjamin dipatuhinya arahan manajemen. Oleh karena itu, definisi pengendalian yang disebutkan di atas dapat diterapkan pada bisnis yang menggunakan komputer, peralatan pembukuan, atau manajemen informasi manual.

Penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, membimbing, mengendalikan, dan mengawasi operasi dalam rangka menjamin pencapaian tujuan

organisasi dikenal sebagai pengendalian internal. Maharani (2020) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal organisasi dan manajemen bisnis yang sukses terkait erat. Tujuan dan sasaran perusahaan dapat tercapai jika didukung oleh pengendalian internal yang kuat, karena hal ini merupakan salah satu instrumen perusahaan untuk melakukannya.

Pengendalian internal harus diterapkan dalam prosedur pengeluaran kas mengingat semakin banyaknya masalah yang melibatkan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi bisnis. Hal ini akan memungkinkan prosedur untuk mengidentifikasi tujuan dengan jelas, seperti menjamin akurasi informasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memverifikasi integritas dan ketergantungan data akuntansi, pengendalian internal juga dapat mencegah kecurangan dan penyalahgunaan aset (S. Warren, 2017).

Dalam perusahaan, kas berfungsi sebagai fondasi dan alat pertukaran utama untuk mengukur dan menghitung item. Koin, uang logam, uang kertas, dan uang deposito bank semuanya dianggap sebagai kas sebagai aset lancar (Kieso, 2017). Kas digolongkan kedalam aktiva yang rawan dikarenakan dalam proses nya kas mudah dipindah tangankan. Dengan kata lain hal ini akan sangat beresiko terjadinya manipulasi seperti penyelewengan atau bahkan penggelapan kas perusahaan cukup besar, Membangun sistem pengendalian internal yang kuat untuk pengelolaan kas yang sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan sangat penting untuk mencegah hal ini (Maharani, 2020).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAL) No. 2 Tahun 2019 Kas adalah mekanisme pembayaran yang tersedia dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Pengelolaan pengeluaran kas yang baik memerlukan perencanaaan dan pemantauan sehingga organisasi profit dan non profit dapat mengontrol arus kas. Menurut Farida (2020) kas dapat digunkan secepat mungkin karena sifatnya yang liquid, penerimaan dan pengeluaran nya sangat mudah, sehingg pelaku bisnis harus lebih berhati-hati dalam memilih bendara atau bagian keuangan perusahaan untuk menangani kas (Farida, 2020). Selain itu, kas merupakan kebuthan pokok untuk operasional negara mauapun perusahaan.

Pengelolaan prosedur pengeluaran kas yang baik memerlukan perencanaan dan pemantauan sehingga organisasi profit dan non profit dapat mengontrol arus kas masuk dan keluar. Menurut Farida (2020), kas dapat digunakan secepat mungkin karena sifatnya yang liquid, penerimaan dan pengeluaran sangat mudah, sehingga pelaku bisnis harus lebih berhati-hati dalam memilih bendahara atau bagian keaungan perusahaan untuk menangani kas. Selain itu, kas merupakan kebutuhan pokok untuk operasional negara maupun perusahaan (Farida, 2020).

Karena kerentanannya terhadap pencurian dan potensi salah saji yang besar, kas menjadi sangat penting (Alvin A. Arens, 2017). Desain pengendalian internal atas kas harus memastikan keamanan dan perlindungan aktivitas bisnis, mencegah kas disalahgunakan. Mengingat, dibandingkan dengan aset lainnya, kas mudah berubah (M Dwi, 2012)

Karena sifatnya yang likuid dan mudah dicuri, kas menjadi komponen vital yang menjaga kelancaran bisnis. Oleh karena itu, pengendalian internal kas diperlukan untuk memisahkan bagian-bagian yang ada seperti pencatatan dan pembukuan. Selain itu sepatutnya diadakan pengawasan terhadap bagian-bagian kas (Dita D. K., 2021).

Dengan persaingan yang semakin ketat pada zaman sekarang, dapat dikatakan sebuat perusahaan berhasil dalalam mencapai tujuan maka dari itu laporan keuangan dapat mencerminkan sebagai salah satu kinerja dari karyawan (Rizka Ramyanti, 2019). Pada kantor notaris Hesti Sulisitati Bimasto, pengeloaan keuangan dilakukan oleh orang yang berpengelaman dalam bidang nya, serta dalam proses pengeluaran dari permohonan prosedur pengeluaran kas, prosecur pembuatan bukti kas keluara hingga pencataan dilakukan oleh bagian keuangan. Pembagian tugas dan tanggung jawaba pada kantor notaris juga telah terlihat jelas dengan adanya struktur organisasi. Namun, untuk dalam praktek nya masih ada yang harus diperbaiki dalam pembagian tugas dan tanggung jawab ini. Dengan hal ini Kantor Notaris dan PPAT Hesti Sulistiati Bimasto, SH, yang semestinya dapat menggunakan dan menerapkan pengendalian internal. Penerapan prosedur pengeluaran kas yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kas. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang sesuai untuk mengawasi proses pengeluaran kas, terutama dalam hal pengeluaran kas yang terkait dengan kantor notaris. Hal ini juga menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan atau pun organisasi,

karena dalam kegiatan sehari-hari pengleuaran kas tidak dapat di hindari. Organisasi yang menerapkan sistem pengendalian internal mengacu pada organisasi yang memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian fungsi dan tanggung jawab, sistem otoritas prosedur pencatatan yang baik, serta memiliki sumber daya yang memadai. Pengendalian internal yang baik akan membantu dalam mengurangi resiko yang terjadi dalam perusahaan khususnya dalam transaksi pengeluaran kas.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengendalian internal telah mengacu pada kerangka kerja COSO, khususnya berfokus pada sistem pengendalian internal untuk penerimaan dan pengeluaran kas pada berbagai jenis usaha. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Riyan Pratama Heriyanto pada tahun 2020. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pengendalian internal, termasuk kurangnya kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi, pemrosesan informasi yang masih manual, dan kurangnya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan oknum yang lalai dapat mengubah data dalam kegiatan transaksi keuangan Klinik X (Heriyanto, 2020). Menurut temuan (Sari *et al.* 2020), penerapan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Rumah Sakit Umum Muhammadiyah sudah baik, secara umum sudah sesuai dengan protokol, dan telah menunjukkan pengendalian internal yang kuat. Karena sesuai dengan protokol yang diikuti, sistem penerimaan kas untuk pembayaran rawat inap dan instalasi gawat darurat dapat diterima. RSU Muhammadiyah secara umum telah sesuai dengan protokol yang diikuti. Secara umum, RSU Muhammadiyah telah mematuhi semua persyaratan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas.

Sementara itu, pada penelitian ini akan diambil objek penelitian yaitu kantor Notaris dan PPAT Hesti Sulistiati Bimasto, SH sebagai organisasi profit yang bergerak dalam bidang penyedia jasa dan tujuan dari perusahaan adalah agar dapat memberikan pelayanan jasa yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat tentang adanya alat bukti jika terjadi serta berbagai perjanjian anatar subjek hukum yang satu dengan yang lainnya.

Gagasan COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) biasanya digunakan oleh pengendalian internal. Di Amerika Serikat, COSO didirikan sebagai organisasi swasta pada tahun 1985. Tujuan dari COSO adalah untuk

mempelajari kecurangan pelaporan keuangan (COSO, 2013). Dengan informasi tersebut, pengendalian internal dapat dikembangkan dengan menggunakan kerangka kerja konseptual COSO sebagai panduan (Yulia et al., 2021). Perusahaan dapat menilai sistem pengendalian mereka dengan menggunakan definisi umum pengendalian, standar, dan pedoman yang telah dibuat oleh COSO.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis penerapan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengendalian internal khususnya dalam prosedur pengeluaran kan untuk biaya keamana pada kantor notaris dan PPAT Hesti Sulistiati Bimasto, SH. Karena Analisis COSO merupakan analisis sistem pengendalian internal yang menjadi acuan bagi analisis sistem pengendalian internal lainnya, maka analisis ini menjadi dasar dari penelitian ini.

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

"Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pengeluaran Kas Berbasis COSO studi Kasus Di kantor Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH"

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, selanjutnya rumusan masalah yang telah dijelaskan menenai efektivitas sitem pengendalian internal pada prosedur pengelaran kas sehingga pertanyaan penelitian adalah sebagai beritkut:

1.2.1. Bagaimna mekanisme pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas di kantor notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH?

1.2.2. Bagaimana efektivitas pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas untuk biaya keamana Kantor Notaris hesti Sulistiati Bimasto, SH?

1.2.3. Apakah pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas di Kantor notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH telah sesuai dengan penerapan komponen pengendalian internal berbasis COSO framework 2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penerapan pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas Kantor Notaris Hesti Sulistiati Bimasto,SH.
2. Mengidentifikasi efektifitas pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas kantor notaris Hesti Sulistiati Bimasto,SH.
3. Mengetahui kesesuaian pengendalian internal pada prosedur pengeluaran kas kantor notaris Hesti Sulitiati Bimasto, SH dengan komponen pengendalian internal berbasis COSO.

UNIVERSITAS TRILOGI